



Hlc.04.01/307 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 324 /M.PPN/10/2005
TENTANG
PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI
DOMESTIC GAS MARKET DEVELOPMENT PROJECT
DENGAN *WORLD BANK***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin menipisnya persediaan minyak bumi di Indonesia dan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri sebagai implementasi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), maka dirasakan perlu untuk membangun infrastruktur Gas Bumi guna menjamin kelancaran penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*);
- b. bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri masih dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan dan pemakaian Gas Bumi khususnya untuk industri dan usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Barat, Banten dan Jakarta;
- c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b. di atas diperlukan penunjukan delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan *World Bank* dan bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi ...

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memperhatikan:
1. Surat Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan No: S-6028/PB/2005 tanggal 7 September 2005 yang menyatakan bahwa secara yuridis pada prinsipnya PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dapat menerima fasilitas *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), mengingat dalam peraturan perundang-undangan mengenai SLA tidak ada penegasan yang mengecualikan BUMN Tbk. untuk menerima SLA;
 2. Surat Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang menyatakan kebutuhan proyek ini untuk menunjang program Pemerintah dalam hal substitusi pemakaian BBM dengan gas bumi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *DOMESTIC GAS MARKET DEVELOPMENT PROJECT* DENGAN *WORLD BANK*.**

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi *Domestic Gas Market Development Project* dengan *World Bank* pada awal bulan Oktober 2005 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi *Domestic Gas Market Development Project* dengan *World Bank*

kepada ...

kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi dengan *World Bank* tersebut di atas dibebankan kepada anggaran PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Negara BUMN
5. Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal
6. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR : 324 /M.PPN/10/2005

TANGGAL : 11 OKTOBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DALAM NEGOSIASI *DOMESTIC GAS MARKET DEVELOPMENT PROJECT* DENGAN
WORLD BANK

A. TIM DELEGASI

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Imron Bulkin
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Bappenas. | Sebagai
Ketua |
| 2. | Iin Arifin Takhyan
Dirjen Migas,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). | Sebagai
Wakil |
| 3. | Mulia P. Nasution
Dirjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai
Anggota |
| 4. | Lukito Dinarsyah Tuwo
Deputi Pendanaan Pembangunan,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 5. | Thamrin Sihite
Karo Perencanaan dan Kerjasama LN,
Departemen ESDM. | Sebagai
Anggota |
| 6. | Gumilang Hardjakoesoema
Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 7. | Erie Sudarmo
Direktur Pengolahan dan Niaga Migas, Ditjen Migas,
Departemen ESDM. | Sebagai
Anggota |
| 8. | Delthy Simatupang
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| | | 9. Dewo ... |

9. Dewo Broto Joko Putranto
Kepala Biro Hukum
Bappenas. Sebagai
Anggota
10. Teguh Wiyono
Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman,
Departemen Keuangan. Sebagai
Anggota
11. Dharma Bhakti
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
Departemen Keuangan. Sebagai
Anggota
12. Jarman
Asdep Usaha Industri Strategis dan Telekomunikasi,
Kantor Meneg BUMN. Sebagai
Anggota
13. WMP Simandjuntak,
Direktur Utama PT. PGN (Persero), Tbk. Sebagai
Anggota
14. Djoko Pramono
Direktur Keuangan PT.PGN (Persero), Tbk. Sebagai
Anggota

B. TIM TEKNIS

1. Adil Abas Reksoatmodjo
Direktur Pengembangan PT.PGN (Persero), Tbk. Sebagai
Ketua
2. Obrian Saragih
Kepala Biro Umum
Bappenas Sebagai
Anggota
3. Iwan Heryawan
Korpel PTGI, PT. PGN (Persero), Tbk. Sebagai
Wakil Ketua
4. Eddy Satriya
Kasubdit Energi,
Bappenas. Sebagai
Anggota
5. Paham Gultom
Kasubdit Pengangkutan dan Penyimpanan Migas,
Ditjen Migas, Departemen ESDM. Sebagai
Anggota
6. Andar Sinaga
Kasubdit DP3, Departemen Keuangan. Sebagai
Anggota
7. Hermani Noor
Kasubdit PHLN I, Departemen Keuangan. Sebagai
Anggota

8. Djasriadi ...

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 8. | Djasriadi
Kabid pada Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis,
Energi dan Telekomunikasi, Meneg BUMN. | Sebagai
Anggota |
| 9. | Hanan Nugroho
Perencana Senior Energi, Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 10. | Benyus Damanik
Kasubid Evaluasi Industri Strategis, Kementerian BUMN. | Sebagai
anggota |
| 11. | Bastian
Kasi Pengembangan Energi, Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 12. | Teni Widuriyanti
Kasi Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas. | Sebagai
anggota |
| 13. | Uji Subroto Santoso
Kadiv Perencanaan dan Enjiniring, PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 14. | Bambang Ismartono
Kadiv Pemasaran, PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 15. | Triyono Heriyanto
Kadiv Operasi & Mapro Pengadaan WJD,
PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 16. | Mangatas Panjaitan
Kadiv Akuntansi dan Anggaran, PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 17. | Herman Usman
Kadiv Kajian Pengusahaan dan Pengembangan Usaha,
PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 18. | Achmad Rifai
West Java Distribution Project, PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 19. | Arman Widhymarmanto
Advisor I Perencanaan, PT PGN (Persero), Tbk. | Sebagai
Anggota |
| 20. | Niken Pujiastuti
Staf PHLN I, Departemen Keuangan. | Sebagai
anggota |

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI